



# Legislatif Minta Fasilitas Dimaksimalkan

## ■ Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Soroti Rumah Layanan Disabilitas

**YOGYA. TRIBUN** - Kalangan legislatif menyortir operasional rumah layanan disabilitas yang secara resmi diluncurkan Pemkot Yogyakarta di kompleks UPT Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 15 November lalu.

Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Suryani mengatakan, rumah layanan disabilitas diharapkan dapat menjadi embrio layanan terintegrasi. Ia menandatangani, legislatif siap mengawal keberlangsungannya untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai kota inklusif.

Karenanya, politik PDI Perjuangan itu berharap, pelayanan yang diberikan bisa mencakup penyandang disabilitas secara merata tanpa terkecuali. Artinya, tak sebatas yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos saja.

"Harapan kami, bisa melayani semua disabilitas di Kota Yogya. Datanya, di kota ada 3 ribu penyandang disabilitas. Tapi, yang masuk DTKS hanya sekitaran seribu saja," ungkapnya di sela kunjungan ke rumah layanan disabilitas, Selasa (13/12).

Karena itu, lanjut Suryani, rumah layanan disabilitas harus ambil peran un-

tuk menjembatani beragam kebutuhan para penyandang difabel. Dijelaskannya, pemerintah pusat sudah meluncurkan program bantuan permukiman pada

penyandang disabilitas, dengan nominal Rp21 ribu per harinya, untuk dua kali makan bagi setiap penyandang disabilitas yang masuk di DTKS.

"Maka, rumah layanan disabilitas harus sanggup menjembatannya. Ini masalah jadup (jaminan hidup) yang harus diperhatikan Pemkot," cetusnya.

Di samping jadup, terdapat dua komponen lain yang mutlak dibutuhkan penyandang disabilitas, serta diharapkan mampu terfasilitasi melalui rumah layanan disabilitas. Keduanya, meliputi alat bantu, sampai strategi pemberdayaan ekonomi.

"Alat bantu sudah berjalan, meski belum masif. Jadi, itu saya usulkan masuk ke JSS (Jogja Smart Service), supaya semua bisa melihat dan mengakses. Coba ditambah menu baru di JSS, soal rumah layanan disabilitas yang bisa membantu," ucapnya.

Tak kalah penting, adalah soal pemberdayaan ekonomi, di mana para penyandang disabilitas didorong menuju mandiri. Ia menyebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejatinya

bisa menekan pemberi kerja, atau perusahaan, untuk memfasilitasi para penyandang disabilitas.

### Masih Embrio

Sementara Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Edi Sumbodo menyatakan, kesiapannya untuk memaksimalkan fasilitas rumah layanan disabilitas untuk memenuhi keperluan masyarakat berkebutuhan khusus di wilayahnya.

Ia menyampaikan, rumah layanan disabilitas yang diluncurkan 15 November silam, masih bersifat embrio. Sehingga, katanya, ke depan masih ada pengembangan-pengembangan selanjutnya.

"Ke depan nanti, harapannya terkait permintaan alat bantu, kemudian informasi mengenai ketenagakerjaan semuanya dapat diakses di sini," tandasnya.

Dijelaskannya, masalah penyediaan alat bantu kini menjadi fokus yang diupayakan agar permintaan para penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Menurut Edi, hal tersebut sebagai langkah strategis Pemkot supaya para penyandang disabilitas bisa mandiri, dan tidak bergantung pada uluran tangan pemerintah.

"Tapi, sekali lagi, ini baru tahap awal. Kalau layanan lain, misalnya pendidikan, itu sudah ada Unit Layanan Disabilitas. Nah, kemudian, yang di sini, kami melayani sektor sosial dan ketenagakerjaan," kata Edi. **(aka)**

**Maka, rumah layanan disabilitas harus sanggup menjembatannya. Ini masalah jadup (jaminan hidup) yang harus diperhatikan Pemkot.**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 26 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005